

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan sumberdaya alam dengan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup makhluk yang ada di bumi, termasuk kelangsungan hidup dan kesinambungan mata rantai pangan manusia sebagai salah satu pendukung dalam kegiatan ekonomi, baik di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi dan aktivitas-aktivitas lain yang sudah melekat dalam dinamika masyarakat. Sumberdaya Air yang membasahi ekosistem terestrial dalam bentuk hujan dan kemudian mengalir melalui permukaan tanah dan menuju ke laut menyebabkan berlangsungnya kehidupan yang kompleks bagi makhluk yang berada di planet bumi ini.

Menurut Gunawan dan Herumurti (2007), berpendapat bahwa air merupakan sumberdaya alam yang berperan penting dalam mendukung kehidupan dan penghidupan manusia, tanpa air hidup manusia akan terganggu yang pada akhirnya akan menyebabkan kurangnya keseimbangan lingkungan hidup manusia. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia, air bersih semakin langka dan tidak ada penggantinya. Hal ini merupakan permasalahan utama yang akan dihadapi oleh manusia terkait ketersediaan air bersih. Adanya *gap* antara permintaan, penawaran dan penyedia infrastruktur air bersih yang tidak dengan mudah diperoleh dan dipenuhi, menjadikan beban yang amat berat bagi pemerintah untuk mengatasi.

Terbatasnya jumlah air yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus bertambah dan kerusakan lingkungan sumberdaya air akibat perlakuan semena-mena umat manusia, yang disebabkan oleh sifat atau ciri yang melekat pada sumberdaya alam air dan lingkungan tersebut, mendorong manusia untuk mengeksploitasi secara berlebihan, sehingga menurunkan nilai dan fungsi sumberdaya alam itu sendiri. Ada beberapa ciri yang menonjol terhadap sumberdaya alam dan lingkungan yaitu : sifatnya sebagai barang publik (*publik good*), sifatnya sebagai barang milik bersama, (*common property*), dan adanya ciri atau sifat eksternalitas. Permasalahan yang mendasar berikutnya adalah adanya variasi musim, dimana pada waktu musim hujan, beberapa wilayah mengalami kelimpahan air yang besar dibandingkan dengan wilayah lain,

sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan kerusakan sumberdaya alam lainnya. Sedangkan pada saat musim kering, kekurangan air dan kekeringan menjadikan bencana yang mengerikan yang mengakibatkan bencana kelaparan dan kematian.

Adanya keterbatasan sumberdaya air, maka berlakulah hukum ekonomi, yang menyatakan bahwa air merupakan benda ekonomis dimana seseorang rela membayar demi untuk mendapat air, bahkan rela harus berjalan puluhan kilometer jauhnya demi untuk mendapatkan air apalagi pada saat musim kemarau yang berkepanjangan. Sedangkan masyarakat perkotaan mengalami keterbatasan akses mendapatkan air bersih dalam skala jumlah yang cukup

Amdani (2001) menyatakan bahwa pengadaan air di bumi di atur oleh siklus hidrologi, yaitu sebuah siklus yang menggambarkan sirkulasi air dari atmosfer udara ke bumi yang mengikuti gaya gravitasi (dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah), lalu kemudian mengalami evaporasi dan kembali ke udara, secara terus menerus dan selalu berkesinambungan melalui proses alamiah. Melalui siklus inilah *supply* air yang tersedia bagi manusia dan organisme lainnya diperoleh melalui dua sumber yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan terdiri dari sungai-sungai, danau, waduk dan aliran permukaan tanah (*run off*). Sedangkan air bawah tanah adalah air yang meresap ke dalam tanah (*infiltration*).

Menyikapi perubahan musim yang secara ekstrim berdampak pada ketersediaan sumberdaya yang cukup dalam rangka memenuhi kewajiban negara, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004. Tentang sumberdaya air, yang dikhususkan untuk mengatur dan mengelola air secara terpadu dan berkelanjutan. Manajemen sumberdaya air ini sangatlah penting karena keseimbangan penyediaan air disetiap musim tidaklah sama. Akibat adanya perubahan musim secara ekstrim, akan menyebabkan terjadinya krisis air.

Penyediaan air bersih di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknologi, anggaran maupun pencemaran. Salah satu permasalahan yang ada adalah ketersediaan yang minim dan meningkatnya biaya operasional unit-unit pengolahan air. Peningkatan ini dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. keadaan ini berdampak cukup besar terhadap kegiatan operasi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sebagai salah

satu penyedia air. Menurut Kusuma (2006), berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bapernas dan Persatuan Perusahaan Air (Perpemsi) menyatakan bahwa 87 dari 303 PDAM seluruh Indonesia berada dalam keadaan kritis dalam hal manajemen pengelolaannya. Selain itu, PDAM menghadapi masalah inefisiensi sehingga belum dapat melayani masyarakat secara optimal.

Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang terletak di sebelah timur pulau Jawa provinsi Jawa Timur, yang sudah dikenal dengan daerah minus, tandus tanahnya dibanding daerah-daerah lain di Jawa Timur dan juga termasuk dalam daerah rawan akan kekeringan atau kekurangan air Udiana (2013). Pada saat musim penghujan, air hujan dengan cepat mengalir ke laut dan sedikit yang dapat meresap kedalam tanah, sedangkan pada saat musim kemarau sebagian besar wilayah di Madura mengalami kekeringan dan kekurangan air, air permukaan maupun air tanah sulit untuk didapatkan, sehingga pada umumnya masyarakat Madura terutama daerah pinggiran atau pedesaan yang jauh dari kota sering kali mengalami kesulitan memperoleh air bersih dalam skala yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi dan mencuci, mereka terpaksa untuk mengandalkan *supplay* air dari PDAM yang didistribusikan melalui truk-truk tangki yang jumlahnya sangat terbatas.

Dengan demikian air bersih (*fresh water*) sudah menjadi barang ekonomi, dimana semenjak air digunakan dalam berbagai kepentingan dan persaingan demi untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan manusia, seperti air minum, kesehatan, pelayanan sanitasi, irigasi, industri, PLTA, penerbangan, navigasi dan turisme. Sehingga penawaran terhadap air di suatu wilayah menjadi penting, apalagi jika suatu wilayah sangat terbatas atau tidak memiliki sumberdaya air yang cukup maka gejala kelangkaan akan dirasakan.

Di pedesaan madura masalah penyediaan air bersih menjadi isu yang sangat krusial. Di satu sisi investasi yang diperlukan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya air tersebut memerlukan biaya yang sangat mahal. Disisi lain daya beli masyarakat pedesaan sangat minim sehingga untuk menjamin kelangsungan pengelolaan sumberdaya air tersebut diperlukan strategi khusus untuk menetapkan harga air yang paling optimal sehingga dari sisi konsumen dapat dijangkau sementara dari sisi produsen harga air tersebut dapat menutupi semua komponen biaya yang diperlukan untuk memproduksinya. Karena itu peneliti

merasa perlu untuk melakukan kajian terkait dengan masalah penetapan harga air.

1.2. Rumusan Masalah

Desa Bandang Dajah merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir selat pantai utara Kecamatan Tanjung Bumi yang berjarak sekitar $\pm$ 30 kilometer dari Kota Bangkalan, dengan kondisi tanah yang agak keras dan sering rawan air bersih atau sering mengalami kekurangan air. Lalu ada seseorang yang disegani oleh masyarakat desa setempat yaitu H. Tumar yang ditunjuk sebagai pengelola HIPAM (Himpunan Pengelola Air Minum). Seiring berjalannya waktu dan usahanya pihak pengelola PAM mendapat bantuan dua pipa paralon dari PEMKAB Bangkalan, namun hal ini masih dirasa kurang maksimal untuk mensejahterakan masyarakat Desa Bandang Dajah dan umumnya Masyarakat Tanjung Bumi, usahanya beliau masih tetap berlanjut, lalu kemudian perjuangannya menuai hasil dengan uluran tangan PHE WMO dengan bantuan lima pipa paralon yang bisa menjangkau konsumen sekitar 500 kepala rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana kelompok pengelola air HIPAM di Desa Bandang Dajah dalam menetapkan harga air yang dikonsumsi oleh warga setempat?.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Mengetahui harga air dari sisi permintaan.
2. Mengetahui harga air dari sisi penawaran
3. Mengetahui mekanisme penetapan harga air oleh kelompok pengelola air PAM dan implikasi dari harga yang ditetapkan terhadap kelangsungan HIPAM.